

PERJALANAN KESULTANAN BANJAR: DARI LEGITIMASI POLITIK KE IDENTITAS KULTURAL

Norpikriadi

*Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Amuntai, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;
email: jaka.cendikia@yahoo.com*

Artikel masuk pada 17 April 2014

Artikel direvisi pada 29 September 2014

Artikel selesai disunting pada 10 Oktober 2014

Abstrak. Kerajaan Islam Banjar yang pada masa lalu wilayah pengaruhnya mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur sekarang, menjadi fokus kajian tulisan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap bagaimana dan dari mana ia sebagai sebuah pranata politik mendapatkan sumber legitimasinya. Dari sini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pemahaman baru bagi masyarakat terhadap masalah terkait. Metode penelitiannya sendiri menggunakan metodologi penelitian sejarah. Hasil penelitian memperlihatkan dinamika kesultanan tersebut, di mana ia kokoh bertahan saat setia pada tradisi sebagai sumber legitimasi, dan hancur lebur manakala bermain api dengan kekuatan asing yang sekuler. Negara tradisional ini kian menarik dicermati ketika wajahnya coba dimunculkan lagi dalam masa empat tahun belakangan oleh sementara “*tutus*” yang merasa sebagai ahli warisnya.

Kata Kunci: legitimasi politik, kesultanan, politik, kolonial, dinasti, konflik, tradisi, Banjar.

Abstract. The Journey of Banjarese Sultanate: From Political Legitimacy to Cultural Identity. *The focus of this research study is the extensive influence of Islamic Banjarese Kingdom in the past, which covered today's South Kalimantan, Central Kalimantan, and some part of East Kalimantan. This study aims to reveal how and from where this kingdom as a political institution obtained the source of legitimacy. It is expected to provide benefits for the community in the form of a new understanding of the relevant issues. The research method used is historical research methodology. The results showed the dynamics of the kingdom, in which it survived sturdily when holding faithfulness to the tradition as a source of legitimacy, and was devastated when playing with fire with secular foreign powers. This traditional country gets increasingly attractive to observe during this past four years when it was re-emerged by some “tutus” who believe to be the heirs of this kingdom.*

Keywords: political legitimacy, empire, politics, colonial, dynasty, conflict, tradition, Banjarese.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Legitimasi politik mutlak diperlukan bagi sebuah negara sebagai prasyarat eksistensinya dalam mengarungi sejarah. Ia menjadi penting karena berfungsi sebagai alat pengakuan terhadap keberadaan negara, baik dari pihak luar maupun dari rakyatnya sendiri. Dalam belantara Ilmu Politik bertaburan teori-teori yang berbicara tentang masalah ini. Namun demikian, tentu hal absurd apabila kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa lalu “diadili” dari perspektif modern seperti teori kedaulatan rakyat, kontrak sosial, atau teori-teori lain yang notabene lahir sebagai antitesis dari absolutisme negara-negara tradisional semacam itu di Eropa. Lantas, dari mana mereka mencari—

dan lalu menemukan—legitimasi politiknya manakala paham-paham modern cenderung menutup pintu kepadanya?

Teori teokrasi dengan tokoh-tokohnya Agustinus, Thomas Aquinas, dan Friedrich Julius Stahl tampaknya paling relevan untuk meneropong keberadaan negara-negara tradisional tersebut. Kendati teori yang berkembang pada abad pertengahan ini erat kaitannya dengan perkembangan Agama Kristen, di mana gereja memiliki kekuasaan politik di samping kekuasaan teokratis raja-raja feodal Eropa, namun secara prinsip penggunaan teori ini tetap relevan dalam persoalan terkait.

Secara umum teori teokrasi berasumsi, negara mestilah dipimpin seseorang yang menjadi

kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Jadi dasar kekuasaannya dianggap ditopang oleh faktor wahyu. Sebab itulah hak memerintah bukanlah sesuatu yang dapat diraih sembarang orang, melainkan menjadi hak istimewa sang manusia pilihan (dan keturunannya) dalam balutan sistem religi masyarakat pengusungnya. Dapat dipahami apabila tiap-tiap kaisar bagi masyarakat Jepang yang Sintoistik dipandang sebagai keturunan *Amiteasu Omikami* (Dewi Matahari). Jika ditarik ke ranah negeri dapat kita lihat raja-raja pada masa Hindu-Budha, seperti pendiri Kerajaan Singasari Ken Arok yang oleh kitab *Pararaton* dicitrakan sebagai putra Brahma, titisan Wisnu, serta penjelmaan Siwa. Dengan demikian, sistem kepercayaan dalam tradisi masyarakatlah yang menjadi sumber legitimasi politik bagi penguasa-penguasa tradisional beserta keturunan (*trah*)-nya. Pola semacam ini tampak diacu Kerajaan Islam Banjar pada masa-masa awal dan pertengahannya sebelum kesultanan ini akhirnya terkesan menjadi “sekuler” dalam mencari sumber legitimasi politik. Sesuatu yang kemudian menggiringnya ke lubang kuburnya sendiri.

Adalah fakta, bahwa hanya sedikit dari negara-negara tradisional di Indonesia yang sanggup bertahan dari perubahan demi perubahan zaman. Bagi yang berhasil bertahan pun wujud aslinya telah tanggal sebagai pranata negara, karena lebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kerajaan-kerajaan itu kini lebih dipandang sebagai aset budaya nasional bagi Indonesia yang telah secara sah menjadi ahli waris kekuasaan masa lalu mereka. Kendati demikian, hal itu ternyata tidak mengaral antusiasme para perindu kejayaan masa lalu untuk menghidupkan kembali kerajaan mereka yang telah lenyap dalam gelombang sejarah. Menurut Helius Sjamsuddin (dalam Randu Alamsyah 2011), pada dasawarsa terakhir abad ke-20 dan/atau dasawarsa pertama abad ke-21 kita semua menyaksikan semacam “gerakan” kehadiran kembali puluhan—kalau bukan ratusan—kerajaan/kesultanan di Indonesia dengan sebutan “Kesultanan Nusantara” yang raja-raja/sultan-sultannya berhimpun dalam sebuah forum silaturahmi bersama. Wujud luarnya berupa pertemuan dua tahun sekali secara bergilir dalam bentuk Festival Keraton Nusantara (FKN).

Kesultanan Banjar yang pada 11 Desember 2015 nanti merayakan tahun ke-5 dari hari kebangkitannya merupakan bagian dari fenomena tersebut. Meskipun secara resmi kesultanan ini dibubarkan Belanda pada tahun 1860, namun dengan ditopang semangat perlawanan Pangeran Antasari dan Sultan Muhammad Seman terhadap penguasa kolonial tersebut, tradisi Kesultanan Banjar sanggup bertahan hingga 1905 (Helius 2001). Empat tahun lalu, salah satu negara tradisional di Nusantara yang pada awal abad ke-17 menurut *L.C.D. van Dijk* suzerinitasnya meliputi Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah dan Barat (Dalam Saleh 1975, 31; 83) ini didirikan kembali dengan menahtakan Pangeran Haji Khairul Saleh sebagai Raja Mudanya. Sekalipun kehadirannya kini cuma terkategori sebagai “aset budaya nasional” seperti disinggung di atas, namun cukup menarik untuk dikaji bagaimana Kesultanan Banjar mendapatkan legitimasi politik dalam sejarahnya.

2. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap akar sejarah tentang sumber legitimasi politik bagi Kesultanan Banjar, sebuah Kerajaan Islam yang pernah hidup di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sejak abad ke-16 M hingga awal abad ke-20 M. Kajian ini dirasa kian penting manakala sejak tahun 2010 lalu Kesultanan Banjar yang telah sekian lama absen dalam kancah sejarah coba dihidupkan kembali oleh keturunan dari salah satu cabang dinastinya.

Restorasi kerajaan tersebut dalam konteks kekinian memang mustahil tampil dalam wujud aslinya, yakni sebagai sebuah pranata politik melainkan—seperti yang diklaim penggagasnya—tak lebih sebagai bentuk pelestarian budaya semata. Kendati demikian, tak sedikit kalangan yang mencurigainya sebagai upaya kaum aristokrat lokal (*bubuhan pagustian*) mengembalikan aroma feodalisme ke kancah politik praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya yang pemerhati sejarah dan politik lokal Banjar, sehingga memperoleh pemahaman baru tentang persoalan legitimasi politik Kesultanan Banjar.

B. Metode Penelitian

Dari sisi orisinilitas sumber, tulisan ini memang tidak menggambarkan sebuah penelitian sejarah yang ideal, namun dalam prosesnya ia tetap berusaha mengikuti alur metodologi penelitian sejarah baku yang meliputi: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi sebagai tahap akhir.

Kelemahan penelitian ini terutama terletak pada masalah sumber data yang kebanyakan bersifat sekunder. Kendati demikian, perlu dicatat di antara sumber-sumber itu beberapa di antaranya menyajikan “data asli secara telanjang,” sehingga membuka ruang untuk penafsiran ulang, yang terkadang menghasilkan perspektif baru terhadap fakta yang tersembunyi di dalamnya. Dalam kaitan ini, kehati-hatian sangat ditekankan ketika berhadapan dengan sumber-sumber data yang memuat fakta-fakta historis yang saling bertentangan. Dengan komparasi antarsumber lengkap dengan argumen peneliti terdahulu yang menyertainya, kepada pembacalah akhirnya semua diserahkan untuk dinilai kadar kebenaran masing-masing.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Tradisi Sebagai Sumber Legitimasi

Dalam kaitan ini, keberadaan cerita rakyat Banjar yang diuraikan dalam disertasi J.J. Ras (1968) sebagai *Hikayat Banjar: Study in Malay Historiography* itu sepertinya kembali tak terhindarkan menjadi rujukan. Namun hingga sekarang untuk daerah Amuntai, saya—biasanya pada kesempatan *mawarung* (minum atau makan di warung kopi) masih sering menemui orang tua yang begitu fasih menuturkan hikayat ini, terutama yang berkaitan dengan periode Hindu Negara Dipa. Khusus data-data yang menyangkut periode Hindu, karya klasik tersebut lebih digunakan sebagai pembanding untuk informasi yang diperoleh langsung dari obrolan demi obrolan dalam suasana informal itu. Justru dengan jalan ini menurut hemat saya, Hikayat Banjar lebih tampil dalam wujud aslinya, yakni benar-benar sebagai sebuah *folklore* (cerita rakyat) masyarakat Banjar.

Dikisahkan, ketika Ampu Jatmika akan wafat ia berpesan kepada Ampu Mandastana dan Lambung

Mangkurat, agar jangan menggantikannya sebagai raja. Menurut penguasa pertama Negara Dipa itu, bencana dan malapetaka akan menimpa jika orang bukan turunan bangsawan seperti mereka menerima kehormatan sebagai raja. Kedua putranya itu dititahkan untuk bertapa sampai menemukan raja manusia yang ditunjuk dewa. “Etika politik” ini berakar dari konsepsi Hinduisme yang dianut pada masa itu. Keluarga pendiri Negara Dipa ini memang tidak berdarah bangsawan, melainkan dari golongan pedagang (*waisya*).

Segera setelah Ampu Jatmika mangkat, Lambung Mangkurat dan Ampu Jatmika melaksanakan wasiat sang ayahanda. Dari pertapaannya di sebuah pusaran air yang dalam, Lambung Mangkurat menemukan Putri Junjung Buih yang kemudian ditahtakan sebagai raja putri di Negara Dipa. Putri ini lalu dikawinkan dengan seorang Pangeran Majapahit bernama Raden Putra yang kemudian juga ditahtakan sebagai raja dengan gelar Pangeran Suryanata. Dari pasangan inilah tercipta kaum bangsawan Banjar, yang menjadi raja-raja Negara Dipa berikutnya. Keturunan mereka pula yang menjadi raja-raja di Negara Daha dan Kerajaan Banjar sebagai kerajaan-kerajaan lanjutan. Menurut tradisi, kepada merekalah masyarakat Banjar meletakkan kesetiaan dan pengabdian dalam tata hidup berkerajaan.

Hinduisme sesungguhnya bukanlah satu-satunya akar dari tradisi politik ini. Masuknya agama-agama besar (Hindu, Budha, Islam, dan Kristen) ke daerah ini tidak membuat kepercayaan nenek moyang dengan segala macam upacara adat religiusnya hilang begitu saja. Semua ini masih berfungsi dan memiliki hidup walaupun wujud lahirnya berubah. Dasar agama suku-suku asli dikenal dengan nama Agama Kaharingan. Dalam konsep kepercayaan agama ini, Tuhan tertinggi berwujud kedwi-tunggalan yang menguasai alam atas dan alam bawah, seakan berupa kesatuan unsur jantan dan betina. Secara totemik penguasa alam atas disebut *tinggang*, yaitu burung enggang sakti. Ia disebut pula dengan macam-macam istilah, seperti *Raja Tongtong Matanandau*, *Kanarohan Tambeng Kabanteran Bulan* (Raja Bulan) atau *Pengeran Matahari* (Suryanata). Sedangkan

penguasa alam bawah adalah *Tambun*¹ sakti bersifat betina atau *Jata*. Ketika Raja-raja Banjar dalam silsilahnya menyebutkan Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih sebagai leluhur asal mereka, maka ini jelas berakar dari kepercayaan dalam Agama Kaharingan Ngaju. Kedwi-tunggalan pasangan itu mencerminkan persatuan langit dan air (Saleh 1984, 21-22).

Lebih jauh tentang itu, Marko Mahin (2005) dalam tulisannya tentang makhluk mitologis naga, melacak kisah tentang Putri Junjung Buih ke kosmologi orang Kalimantan yang mempercayai, di balik riak dan arus sungai terdapat Alam Bawah Air yang dikuasai dewata perempuan bernama *Jata*. *Jata* dalam konsepsi penduduk pribumi digambarkan sebagai naga maha raksasa yang menyangga bumi. Dengan mengacu Idwar Saleh di atas, Marko Mahin mengatakan Putri Junjung Buih adalah manifestasi dari *Jata*, sang penguasa alam bawah air. Keturunannya pun dianggap mempunyai asosiasi dengan Alam Bawah Air yang tampak pada tradisi eksklusif *badudus* dari sekelompok *bubuhan*. Dengan demikian, naga menjadi simbol kekuasaan politik. Hanya *tutus* naga yang boleh menduduki tahta.

Badudus sendiri merupakan ritual wajib yang harus dilakukan sang raja. Sebelum menduduki tahta, raja-raja Kesultanan Banjar melakukan tradisi mandi sebagai perlambang kesucian. Air yang digunakan untuk *badudus* berasal dari tujuh sumber mata air terpisah, yakni dari Gunung Pamaton Mandiangin, Bincau Muara Martapura, Sungai Kitanu Martapura, Sumur Masjid Sultan Suriansyah Banjarmasin, Candi Laras Tapin, Ulakan atau Tumbukan Banyu, Negara Hulu Sungai Selatan, dan Candi Agung Hulu Sungai Utara (Alamsyah 2011, 81-86).

Prosesi seperti itulah yang dijalani oleh Pangeran Haji Khairul Saleh menjelang penobatannya sebagai Raja Muda pada tahun 2010. Sebelum ritual *badudus* dilaksanakan, Tuan Guru Abah Anang Djazouly Seman membacakan doa selamat agar prosesi berjalan lancar. Selama ritual berjalan beberapa orang penonton

mengalami kesurupan, dan Hj. Mulia, salah seorang dari mereka mengaku sebagai “Putri Junjung Buih” yang datang untuk ikut menyaksikan prosesi *badudus* itu (Alamsyah 2011, 91-92).

2. Tradisi Diuji Sejarah

Bertemunya nilai-nilai Hinduisme dengan sistem religi asli pribumi Kalimantan seperti terpaparkan sebelumnya merupakan sebuah sinkretisme yang kemudian memproduksi legitimasi politik bagi masyarakat Banjar. Seorang raja atau calon pengganti raja mestilah putra tertua raja yang lahir dari ibu yang juga berdarah raja. Ini mengacu pada pasangan Suryanata dan Junjung Buih sebagai idealisasinya. Para “*tutus* raja” atau garis lurus keturunan raja-raja (dalam konsepsi Hinduistik) yang juga berarti “*tutus* naga” (dalam konsepsi religi asli), diyakini sebagai wakil dewa di dunia. Tradisi ini dengan sendirinya menjadi sumber legitimasi politik bagi setiap penguasa yang silih berganti bertahta. Meskipun Kesultanan Banjar yang muncul pada abad ke-16 adalah Kerajaan Islam, namun tradisi politik yang diwariskan dari masa Negara Dipa itu ternyata tetap kuat mewarnai proses suksesinya.

Aturan ini rupanya sangat dipahami oleh Maharaja Sukarama, raja kedua Negara Daha (kelanjutan Negara Dipa). Diceritakan dalam Hikayat Banjar, raja ini mempunyai empat orang istri dan empat orang putra dan satu orang putri. Mereka masing-masing adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagalung, Pangeran Jayadewa, dan si bungsu perempuan bernama Putri Galuh Baranakan. Keempat istri raja tersebut rupanya tidak berdarah bangsawan, sehingga sang raja mengawinkan Putri Galuh Baranakan dengan putra saudaranya sendiri, Raden Bagawan, yang bernama Raden Mantri. Pasangan ini (Galuh dan Mantri) kemudian mempunyai seorang anak bernama Raden Samudera. Maharaja Sukarama menganggap cucunya ini memiliki keturunan bergaris lurus (lahir dari kedua orang tua

¹ Masyarakat Banjar khususnya yang tinggal di aliran-aliran sungai sangat akrab dengan istilah *Tambun*. Untuk mencegah anak-anak terlalu sering bermain di sungai (*balumba*), para orang tua kerap kali menakut-nakuti mereka dengan “ancaman tambun” ini, meski rata-rata tidak ada yang tahu bagaimana wujud makhluk ini sebenarnya.

yang sama-sama berdarah raja), sehingga diputuskan sebagai penggantinya kelak. Meski anak-anaknya keberatan atas keputusan itu, tapi sang ayah bersikukuh: "*Maski bagaimana kata angkau kama sudah ia si Samudera itu ringan bibirku*" (Abar 2002, 38-39). Peningkaran terhadap wasiat raja ini, oleh Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumanggung karena ambisi tahta, membawa Kerajaan Negara Daha pada keruntuhannya.

Pada abad ke-19, untuk mencegah krisis serupa dalam hal suksesi istana, Sultan Sulaiman bersama Putranya Sultan Adam, mengambil langkah yang sama. Putra Sultan Adam, Sultan Muda Abdul Rahman dikawinkan dengan sepupunya sendiri, Ratu Siti. Putri ini adalah anak dari saudara Sultan Adam, Pangeran Mangkubumi Nata. Pangeran Hidayatullah yang lahir dari perkawinan itu kemudian diwasiatkan Sultan Adam sebagai pewaris tahta karena—seperti Raden Samudra—kedua orang tuanya sama-sama berdarah raja. "Ia..." kata Sultan Adam. "akan diangkat sebagai pewaris mahkota karena... ia lahir dari seorang Ratu, dan menurut adat itu harus dari anak seorang Ratu dan tidak bisa lain yang dapat menjadi pewaris mahkota..." (Helius 2001)

Peningkaran terhadap wasiat raja ini berarti juga peningkaran terhadap tradisi politik yang telah berumur berabad-abad. Benar saja, ketika Pangeran Tamjid, saudara seayah Hidayat yang ibunya tidak berdarah raja menduduki tahta, maka inilah lonceng kematian bagi Kesultanan Banjar. Seperti Kerajaan Negara Daha, Kesultanan Banjar pun mengalami keruntuhannya.

Munculnya Pangeran Samudera sebagai raja pertama Kesultanan Banjar pada abad ke-16 sesungguhnya berada dalam bingkai tradisi sebagai sumber legitimasi politiknya. Meski ia tampil sebagai penguasa kerajaan baru, namun raja ini secara genealogis merupakan keturunan bergaris lurus (*tutus*) dari penguasa kerajaan-kerajaan sebelumnya. Negara Daha dan Dipa bisa saja runtuh sebagai kerajaan-kerajaan Hindu, namun tradisi politiknya tetap terjaga melalui Kerajaan Islam tersebut. Ironisnya hal ini tidak terjadi pada Kesultanan Banjar ketika ia runtuh pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Hidayat gagal tampil sebagai raja baru meski ia sama *tutus*-nya dengan Pangeran Samudera. Sama-sama pula mereka

diwasiatkan kakeknya sebagai calon sah pengganti raja. Kita akan coba mencari faktor-faktor penyebab runtuhnya Kesultanan Banjar yang menandai pula awal terkikisnya tradisi sebagai sumber legitimasi politik.

3. Tentang Sultan Kuning

Ada dua alasan utama kenapa saya menganggap perlu membahas Sultan Kuning pada bagian tersendiri. Pertama, raja ini adalah penguasa terakhir yang menurunkan raja-raja yang secara tradisi terjaga *ketutusan*-nya. Dengan kata lain, ia adalah penurun raja-raja yang secara setia menjadikan tradisi sebagai sumber legitimasi politik. Ini jelas relevan dengan tema tulisan. Sultan Kuning yang juga bergelar Sultan Hamidullah itu beranak Sultan Muhammad Liauddin Aminullah beranak Pangeran Amir beranak Pangeran Mas'ud beranak Pangeran Antasari (bergelar Panembahan) beranak Sultan Muhammad Seman.

Amir lahir dari perkawinan ayahnya dengan seorang putri Kesultanan Pasir, Mas'ud lahir dari perkawinan ayahnya dengan salah seorang putri Sultan Nata, Antasari lahir dari perkawinan ayahnya dengan Putri Khadijah (saudari Sultan Adam). Hanya Sultan Muhammad Seman yang lahir dari perkawinan ayahnya dengan perempuan biasa, Nyai Fatimah. Namun sultan terakhir ini baru berkuasa penuh setelah saudaranya, Pangeran Muhammad Said yang beribu bangsawan tutup usia (Helius 2001).

Sebagai putra mahkota calon penggantinya pun Sultan Muhammad Seman tidak menunjuk anak lelakinya melainkan kemenakannya, yaitu putra-putra almarhum Muhammad Said bernama Pangeran Perbatasari dan Gusti Muhammad Arsyad. Masing-masing mereka dikawinkan dengan putri-putri Muhammad Seman sendiri, Gusti Hadijah dan Gusti Jaleha (Helius 2001, 325 dan 365).

Terlihat Dinasti Sultan Kuning (selanjutnya disebut Dinasti Kuning) relatif berhasil dalam menjaga *ketutusan*-nya. Pentingnya kedudukan perempuan bangsawan dalam proses suksesi Istana Banjar tentu mengacu pada kedudukan Putri Junjung Buih dalam mitos pembentukan dinasti. Tradisi inilah yang menjadi sumber legitimasi politik bagi Kesultanan Banjar.

Alasan kedua kenapa Sultan Kuning perlu dibahas secara khusus, karena terdapatnya kontroversi tentang masa kekuasaan sultan itu dalam sejarah Banjar. Ir. H. Muhammad Said dengan tanpa menyebutkan sumber menulis: “tahun 1745 Sultan Tahlilillah wafat kemudian digantikan oleh puteranya yang bernama Sultan Kuning. Namun baru beberapa hari diangkat menjadi Raja, Sultan Kuning meninggal dunia”. Di sini Said menempatkan Sultan Kuning sebagai raja ke-8 dengan angka tahun 1745 sebagai masa kekuasaannya. Ia memulai daftar silsilah dari Pangeran Samudera sebagai raja pertama dengan masa kekuasaan pada 1595-1620 (Said 2011, 16).

Sementara Bambang Dedi Mulyadi dengan menyebut karya Ir. HM. Said, Amir Hasan Kiai Bondan, Anggraini Antemas, HA Basuni, Artum Arta dan Hamlan Arfan sebagai rujukan, pada silsilah raja-raja menempatkan Sultan Kuning (1745) sebagai raja ke-15 dengan keterangan: “Sultan Kuning hanya sempat memimpin beberapa bulan kemudian dia mangkat...” Tapi ia memulai dari raja pertama Negara Dipa yaitu Pangeran Suryanata dengan perkiraan memerintah tahun 1438-1460 (Mulyadi 2011, 13). Sekiranya Pangeran Samudera (1595-1620) pada silsilah itu dijadikan sebagai patokan awal maka posisi Sultan Kuning sama saja dengan versi Muhammad Said di atas yaitu sebagai raja ke-8.

Tak berbeda jauh dengan itu, Husni Abar dengan merujuk buku *Kalimantan* (tanpa tahun) terbitan Departemen Penerangan RI menyebutkan: “Sultan Kuning (1745) memerintah hanya beberapa hari saja setelah pelantikannya, kemudian ia meninggal dunia secara mendadak...” (Abar 2002, 49).

Sampai sejauh ini tak satupun sepertinya yang benar-benar meyakinkan, mengingat tak ada di antaranya yang menggunakan sumber primer, bahkan ada yang tidak menyebutkan sumber data sama sekali untuk soal terkait. Padahal hal ini penting dalam sebuah historiografi, atau dalam sebuah produk kreatifitas yang dimaksudkan sebagai tulisan sejarah.

Untunglah pada buku Helius Sjamsuddin *Pegustian dan Temenggung* yang monumental itu, pada lampiran 2 terdapat silsilah Pangeran Antasari dengan judul *Ini Asalnya Pangeran Antasari* sumber

OR 2276 (Perpustakaan Universitas Leiden). Pohon silsilah yang dibuat Pangeran Tumenggung Tanukersa di Banjarmasin itu bertanggal 2 Desember 1860. Jika melihat masa di mana laporan ini dibuat sepertinya pendapat-pendapat di atas dikuatkan oleh “sumber otentik” ini. Meskipun masing-masing sultan pada daftar silsilah tidak disertai keterangan tahun berkuasa namun di situ ada disebutkan: “Ini yang tua Sultan Hamidullah dia juga bernama Sultan Kuning... Maka itu Sultan Hamidullah tiada berapa lama dia jadi Sultan maka dia meninggalkan dunia.” Tetapi untuk penjelasan pada teks, Helius tidak menggunakan sumber itu, melainkan Noorlander *Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft van de 18 de eeuw*, meskipun di sini ia hanya sedikit menyinggung tentang Sultan Kuning, yaitu: “Sultan Hamidullah yang juga dikenal dengan sebutan Sultan Kuning.....berpulang tahun 1734 meninggalkan seorang anak di bawah umur, Muhammad Aminullah...” (Helius 2001)

Tahun 1734 sebagai masa mangkatnya Sultan Kuning yang dikutip Helius di atas berkesesuaian dengan apa yang diungkapkan Tim Peneliti Sejarah Banjar (2003) melalui buku setebal 713 halaman yang diterbitkan Balitbangda Kalimantan Selatan. Pada pohon silsilah di buku tersebut, Sultan Kuning berada pada urutan raja ke-11 dan terdapat keterangan sebagai berikut:

“Abad ke-18 dimulai dengan masa pemerintahan Sultan Hamidullah yang bergelar Sultan Kuning (1700-1734). Pemerintahan pada masa sultan tersebut dikenal dengan pemerintahan yang paling stabil, tidak ada pertentangan dan perebutan kekuasaan, tidak ada campur tangan bangsa asing baik politik maupun ekonomi, sehingga boleh dikatakan Kesultanan Banjarmasin mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan sultan ini...” (Tim Peneliti 2003, 111)

Tak begitu jelas apakah informasi ini adalah sebuah parafrase, atau pengungkapan data telanjang dari suatu sumber dengan hanya menyesuaikan ejaan karena sumber informasinya tidak tercantum pada referensi buku tersebut. Untuk itu ada baiknya kita tengok hasil penelitian M. Idwar Saleh terbitan Balai Pendidikan Guru Bandung tahun 1962 dengan judul *Bandjarmasin*. Di sini Saleh membandingkan dua daftar silsilah raja-raja Banjar yang sesuai ejaan masa itu ia sebut *Chronologi*. Kronologi A diambil dan disusun kembali—bukan

disalin—oleh penulisnya dari buku J. Eisenberger tahun 1936 berjudul *Kroniek van Zuider en Ooster Afdeling van Borneo*. Sementara Kronologi B disalin dari buku J. Noorlander, sebuah disertasi Leiden, tahun 1935. Dan title bukunya ialah *Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft van de 18 de eeuw*.

Pada Kronologi A, Eisenberger memulai dari Raja Negara Dipa pertama Pangeran Suria Anata dengan masa kekuasaan kurang lebih tahun 1436. Sementara Sultan Kuning diletakkan sebagai raja ke-15 dengan angka tahun 1745 (Saleh 1962, 102; 105). Kemungkinan besar versi Eisenberger inilah yang banyak dirujuk oleh penulis-penulis sejarah Banjar, baik langsung atau tidak. Sebab, sama halnya dengan karya H.M. Said dan Mulyadi di atas, jika ditarik dari Raden Samudra/Sultan Suriansyah (1595-1620) sebagai raja pertama maka posisi Sultan Kuning pada silsilah versi Eisenberger jadi raja ke-8 dengan 1745 sebagai tahun berkuasa.

Telah amat sering ditulis orang—dan telah diterima secara umum—tentang peranan Kesultanan Demak dalam proses berdirinya Kesultanan Banjar di Kalimantan, sehingga tak perlu lagi diulang di sini. Berkaitan dengan itu, Idwar Saleh punya kritik terhadap Kronologi A: “Kita tak mengetahui berdasarkan apa Eisenberger memulai Keradjaan Bandjarmasin itu pada tahun 1595. Pada masa ini kedudukan Demak telah digantikan oleh Mataram jang agraris. Puntjak ekspansi laut Demak-Djapara tahun 1574 sudah lampau” (Saleh 1962, 104).

Meneruskan logika Saleh, tentu hal mustahil Demak dapat membantu Pangeran Samudera pada tahun 1595 mendirikan Kesultanan Banjar jika ia sendiri telah tidak ada pada masa itu. Dalam penelitiannya yang lain dan tak kalah mendalam, Idwar Saleh relatif berhasil membuktikan bahwa tahun berdirinya Kesultanan Banjar adalah 1526 (Saleh 1975, 28).

Dengan demikian silsilah versi Eisenberger—dan yang serupa dengannya—memang terkesan agak meragukan sebagai rujukan sejarah. Dengan otomatis pula masa kekuasaan Sultan Kuning yang diinformasikan cuma sekejap secara otomatis patut pula diragukan. Dapat dipahami apabila Idwar Saleh lebih cenderung pada versi Noorlander (*Chronologi*

B) yang tiap-tiap nama pada silsilah terdapat semacam kode-kode referensi untuk menunjukkan sumber data, di antaranya diambil dari karya J. Hageman (1861) berjudul *Geschiedkundige aantekeningen omtrent Zuidelijk Borneo*.

Noorlander memulai daftar silsilah dari Sultan Suriansyah yang perkiraan masa berkuasanya kurang lebih tahun 1550. Jika dibandingkan dengan tahun 1526 yang disimpulkan Idwar Saleh sebagai tahun berdirinya Kesultanan Banjar, maka kronologi tahun menurut Noorlander tadi cukup logis bila diperkirakan sebagai akhir masa kekuasaan raja pertama tersebut. Bertolak dari sinilah barangkali Tim Peneliti Sejarah Banjar kemudian menyebut masa kekuasaan Pangeran Samudera/Sultan Suriansyah adalah tahun 1526-1545 (Tim 2003, 70-71). Pada silsilah versi Noorlander, Sultan Kuning ditempatkan sebagai raja ke-12 dengan masa berkuasa 1700-1734. Namun Noorlander berdasarkan Hageman menaruh Tahmid Ollah (1700) di urutan ke-11 dan berdasarkan *Kroniek 2*² menaruh Tahmid Illah (tanpa keterangan tahun berkuasa) di urutan yang sama. Di samping itu, berdasarkan catatannya sendiri Noorlander menempatkan nama-nama Tahmidullah/Panembahan Kuning/Tingie (tanpa keterangan tahun berkuasa) sebagai raja di urutan yang sama.

Jika dilihat dari tahun-tahun kekuasaannya, pada daftar silsilah versi Noorlander ini terdapat tumpang tindih antara raja ke-11 dengan ke-12. Dalam hal ini saya teringat apa yang dikatakan Drs. Yusliani Noor, M.Pd saat mengikuti mata kuliah Sejarah Lokal yang beliau pegang. Kasus semacam itu menurutnya terjadi kemungkinan karena raja-raja dulu amat gemar mengganti gelar. Dengan asumsi ini maka sangat mungkin raja ke-11 dan 12 itu adalah orang yang sama. Jadi, raja ke-11 yang salah satu gelarnya adalah Panembahan Kuning itu mungkin adalah Sultan Kuning sendiri. Tidak aneh apabila pada pohon silsilah versi Tim Peneliti Sejarah Banjar, Sultan Kuning langsung ditempatkan sebagai Raja Banjar ke-11 dengan masa kekuasaan 1700-1734, suatu masa kekuasaan yang panjang.

Tambahan informasi tentang masalah ini barangkali dapat pula kita lacak secara tersirat

² Kroniek 2 adalah salah satu dari dua naskah Hikayat Banjar yang dijadikan Canse dan Ras sebagai bahan penelitian untuk disertasi mereka.

dengan melihat Gerakan Muning, sebuah gerakan sosial yang muncul pada tahun 1859 di wilayah Kesultanan Banjar. Gerakan ini nantinya menjadi pioner perlawanan terhadap penguasa kolonial Belanda dalam Perang Banjar. Gerakan yang dipelopori oleh kalangan rakyat biasa ini memiliki karakteristik nativisme. Nativisme sendiri merupakan sebuah gerakan yang di dalamnya terdapat berbagai gejala kebencian yang kuat terhadap penguasa asing yang dianggap bertanggung jawab atas keruntuhan masyarakat yang terjadi sekarang. Ini sejalan dengan yang dikatakan Sartono Kartodirdjo, bahwa gejala nativisme hanya muncul pada masa penjajahan sebagai reaksi terhadap kekuasaan kulit putih dengan tujuan menegakkan kembali kerajaan kuno (dalam Basrowi dan Sukidin 2003, 19). Pada Gerakan Muning hasrat itu tertuju pada masa legendaris Negara Dipa dan masa-masa Kesultanan Banjar saat masih diperintah dinasti yang berkuasa. Ini terlihat dari nama-nama yang dikenakan para pelaku gerakan yang merujuk pada nama-nama penting pada masa-masa tersebut, seperti anak perempuan Aling (pemimpin gerakan) bergelar Putri Junjung Buih, sementara anak lelaki Aling dinamai "Sultan Kuning".

Penyebutan nama Sultan Kuning yang merupakan leluhur Pangeran Antasari di dalam Gerakan Muning menurut Husni Abar yang informasinya berdasarkan Arsip Nasional RI adalah: "sebagai patokan kelompok keluarga keraton yang disingkirkan dari pemerintahan Kerajaan Banjar" (Abar 2002, 77). Sementara dari ulasan Helius Sjamsuddin terhadap Gerakan Sosial Muning ia menyebut: "tujuan gerakan ini ialah mengembalikan dinasti lama untuk memerintah kembali dengan kandidat Antasari dan mengembalikan sistem lama dalam pemilihan sultan menurut adat..." (Helius 2001, 253). Sehubungan dengan ini Tim Peneliti Sejarah Banjar secara lugas menyebut bahwa keinginan seperti suasana dinasti lama rupanya berhubungan langsung dengan harapan keadilan, keamanan, dan kemakmuran seperti yang terdapat dalam periode Sultan Kuning (Tim 2002, 185).

Logikanya, masa kekuasaan Sultan Kuning yang diidamkan Gerakan Muning yang notabene refleksi dari idaman masyarakat Banjar waktu itu, mestilah sebuah suasana masa lalu yang ideal (atau

diidealkan) sebagaimana lazimnya cita-cita sebuah gerakan yang bersifat nativisme. Singkatnya, sangat mustahil kejayaan sebuah negeri dapat dibangun oleh pemimpin yang hidup dan berkuasa dalam masa yang teramat singkat.

Sumber asli dari informasi yang meragukan tersebut kemungkinan didasarkan pada silsilah Pangeran Antasari versi Pangeran Tumenggung Tanukarsa seperti telah disebut di muka dengan angka tahun 1860. Untuk itu perlu kiranya meninjau siapa gerangan tokoh ini. Ia ternyata seorang pegawai birokrasi kolonial. Pada susunan administrasi pemerintahan Belanda tahun 1855 (sebelum Kesultanan Banjar dihapus) nama Tumenggung Tanukarsa duduk sebagai salah satu pejabat di bawah Residen A van der Ven. Sesudah kesultanan dihapus (1860), tokoh ini muncul lagi saat Letnan Kolonel G.M. Verspijk jadi residen sebagai salah satu anggota Pengadilan Perdata dan Pidana dengan nama Kiai Ronggo Tumenggung Tanukarsa. Kuin dijadikan daerah istimewa pada tahun 1864 dengan susunan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Controleur : O.M. de Minicle
- b. Ronggo : Kiai Tumenggung Tanu Karsa
- c. Mufti : H. Moh. Amin
- d. Penghulu : Haji Moh. Aboe Sohot (Saleh 1975, 43-46)

Posisi politik dari Tanu Karsa ini penting diketahui agar kita dapat menafsir secara tepat "arah" pohon silsilah Pangeran Antasari yang ia buat. Sebagai seorang pegawai pemerintah Belanda maka tidak heran cara ia membahasakan Antasari sebagai berikut: "...Maka itu Pangeran Mas'ud dia berbini anaknya Sultan Sulaeman yang bernama Gusti Khodijah yaitu Ratu Mas'ud serta dia dapat anak itu Ratu maka itu anak namanya Pangeran Antasari yang sekarang jadi berandal adanya".

Penyebutan Antasari dengan "berandal" jelas mewakili sudut pandang Belanda terhadap pangeran dari dinasti yang berkuasa itu. Meski seperti yang dikemukakan Helius Sjamsuddin, beberapa perwira militer Belanda yang terlibat dalam Perang Banjar juga mengakui legitimitas Pangeran Antasari atas tahta kerajaan. Letnan Bangert misalnya mengatakan, Antasari berasal dari cabang paling murni dari keturunan raja pertama kerajaan Banjarmasin. Sedangkan menurut Kolonel

Andresen, pangeran itu adalah keturunan cabang dari dinasti raja Banjarmasin yang diusurpasi. Selebihnya terutama dalam kaitan perang, istilah “berandal” jamak digunakan untuk menyebut nama Antasari. Stigma serupa juga dikenakan pada penerus Pangeran Antasari yaitu Sultan Muhammad Seman. Di dalam laporan-laporan mereka, Belanda menamakan Sultan Muhammad Seman dengan beberapa sebutan: “Gusti Mat Seman”, “anak Kepala Brandal Antasari”... dan yang paling sering “*pretendant Sultan*” atau yang mengaku dirinya Sultan (Helius 2001). Sebutan-sebutan ini jelas memperlihatkan penyangkalan Belanda terhadap keabsahan keturunan-keturunan Sultan Kuning terhadap tahta Kesultanan Banjar. Dapat dipahami, mengingat penguasa kolonial ini merupakan pendukung (kemudian menjadi “tuan” dari) dinasti yang mengusurpasi kesultanan tersebut.

Dengan demikian, informasi tentang Sultan Kuning pada silsilah Antasari yang dibuat Tanu Karsa di atas sangat mungkin juga merupakan refleksi penyangkalan Belanda terhadap kebesaran dan masa kekuasaan sultan tersebut. Kalimat: “tiada berapa lama dia jadi Sultan maka dia meninggalkan dunia,” bisa saja merupakan upaya untuk mengecilkan keberadaan dan peranan raja ke-11 itu dalam sejarah Banjar.

Upaya mengecilkan rezim masa lalu oleh rezim yang tengah berkuasa lazim terjadi untuk memperkuat posisi dan legitimasi politiknya sendiri. Biasanya langkah ini ditempuh oleh penguasa yang mendapatkan kekuasaan lewat jalan tak wajar, seperti kudeta. Dalam sejarah kontemporer hal ini misalnya dapat dilihat pada apa yang dilakukan rezim orde baru terhadap presiden pertama, Soekarno. Pada masa awal Orba menurut Asvi Warman Adam, strategi pengendalian sejarah mencakup dua hal, yaitu upaya mereduksi peran Soekarno dan sebaliknya membesar-besarkan jasa Soeharto. Penguasaan ingatan kolektif dilakukan melalui semua media yang ada dengan menempatkan Soeharto sebagai tokoh sentral dalam berbagai peristiwa historis. Di sisi lain terdapat upaya gencar untuk meminimalisir peran Soekarno dalam sejarah nasional. Hal ini tampak pada upaya penghilangan gambar sang tokoh pada sebuah foto pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan. Di samping itu, ada tindakan politik

berupa pelarangan ajaran Bung Karno, Marhaenisme (Adam 2007, 155-156).

Strategi semacam ini rupanya telah ditempuh Belanda beserta elit lokal sekutunya sejak perempat akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 dalam politik kolonialismenya di Kalimantan. Sesuai zamannya, penguasaan ingatan kolektif itu dilakukan melalui penulisan laporan-laporan yang bias, subjektif, dan bahkan sangat mungkin dipalsukan. Ironisnya, dari sumber-sumber kolonial inilah sebagian besar bahan kita untuk menuliskan bagaimana masa lalu kita, menuliskan “sejarah kita”. Kolonialisme asing di daerah ini ternyata juga menyebabkan “perampasan objektivitas” dalam wacana sejarah, di samping penyingkiran hak-hak kelompok pewaris tahta dari kedudukan yang semestinya.

Sebagai keturunan dinasti sah yang tersingkir menjadi logis apabila raja terakhir, Sultan Muhammad Seman, berkuasa tanpa disertai kemewahan sebagaimana seharusnya. Di daerah Dusun Hulu di tepian Sungai Menawing (sekarang wilayah Kalimantan Tengah), miniatur kesultanan yang dipimpin oleh sang Sultan dikenal dengan nama *Pegustian* dengan ibukotanya Beras Kuning. Berikut ini adalah kutipan—dengan sedikit meringkas—*Koloniaal Verslag* yang dikutip Helius Sjamsuddin (2001):

“Meskipun pada kenyataannya *pegustian* telah ‘tidak berkuasa dan jatuh melarat,’ untuk alasan-alasan tradisional mereka masih tetap dihormati. *Pegustian* telah mengkerut dan menciut dalam ukuran dan kekayaannya. Untuk kehidupan mereka sehari-hari, misalnya, Sultan Muhammad Seman dan keluarganya harus menggarap sendiri ladang-ladang mereka di Sungai Menawing. Sekali-sekali, prajurit-prajurit bersenjata dari sultan berkeliling dan berlayar ke hulu dan hilir Sungai Barito dan memasuki anak-anak sungainya, mengenakan dan memungut pajak-pajak terhadap mereka yang mengangkut hasil-hasil hutan ke dan dari Dusun Hulu. Sultan juga menerima sedekah (bantuan) dalam bentuk *in natura* dari desa-desa sekitar. Pada peralihan abad, ketika Tumenggung Mangkusari bertemu dengan sultan di Beras Kuning, ia melaporkan kepada Belanda bahwa sultan hidup dalam keadaan papa. Yang tak kunjung habis dimengerti olehnya adalah ketetapan hati sultan itu untuk tidak berhenti dan tetap keras kepala bertahan hidup dan melawan Belanda.”

Bandingkan dengan kemewahan pada masa Sultan Tamjidillah I. Johan Andreas Paravacini yang dikirim VOC tahun 1756 untuk berunding dengan sultan di Kayu Tangi menceritakan pengalamannya dalam kutipan berikut ini:

“Mula-mula barisan tombak dengan tombak yang berpalut perak, di belakangnya pasukan tombak dengan tombak berpalut emas dan sesudah ini lewat pula, maka anggota-anggota penyambut dengan berbaris mengiringkan saya dan tibalah di bagian pertama keraton diiringi dentuman-dentuman meriam dan musik yang merdu. Kemudian dari sini saya diiringkan lagi oleh pasukan pengawal merah bersenjatakan perisai dan pedang, datang di bagian kedua keraton, disambut dengan dentuman meriam dan musik yang merdu, serta diterima oleh barisan penyambut yang lebih besar jumlahnya dan diantarkan oleh pasukan pengawal biru ke bagian keraton yang merupakan ruangan menghadap. Tidaklah dapat dilukiskan keindahan yang dipamerkan dalam upacara ini, ruangan menghadap yang dinding dan lantainya ditutup dengan permadani keemasan, juga piring-piring mangkuk, hingga tempat ludah dari emas. Tempat-tempat sirih dan *bousette-bousette* dari emas yang dihiasi dengan berlian-berlian, batu merah, zamrud dan sapir yang tak ada bandingannya, barisan pengawal pribadi Sultan yang mengelilinginya dengan tombak-tombak, perisai-perisai dan topi helm dari emas, selir-selir raja yang berhiaskan emas intan yang mahal sekali, bangku indah yang tak berbanding, tempat pangeran-pangeran dengan pakaian yang indah-indah duduk, tempat duduk para pembesar-pembesar kerajaan, banyaknya jumlah alat-alat kerajaan, pembawa senjata-senjata kerajaan dan lambang (ornamen) kerajaan, semua mahkota Kerajaan Banjar yang terletak di samping sultan di atas bantal beledru kuning yang dihiasi dengan rumbai-rumbai, hingga membuat seluruhnya suatu pemandangan yang mengagumkan di dunia” (Saleh 1962, 129).

Padahal Sultan Tamjidillah I sebetulnya hanya berkuasa sementara sebagai wali dari putera Sultan Kuning yang belum dewasa saat ditinggal wafat ayahnya. Saat unjuk kemewahan istana itu dilihat Paravacini, sang putera mahkota Muhammad Aminullah hidup sederhana di Tatas (Banjarmasin). Ia yang tahtanya dirampas pamannya itu terpaksa harus menjalani hidup sebagai bajak laut dengan daerah Tabanio sebagai markasnya. Karena kesengsaraan, ia harus melakukan cara-cara ini untuk menopang hidupnya dan pengikut-

pengikutnya. Pada tahun 1759 dengan kekuatan bersenjata yang besar Aminullah berhasil memaksa Tamjidillah I turun tahta. Ia memerintah sebagai Sultan Muhammad Liauddin Aminullah. Pendukungnya hanyalah rakyat jelata, karena kaum bangsawan berpihak pada Tamjidillah I. Pada tanggal 16 Januari 1761 ia wafat dengan meninggalkan dua orang putera di bawah umur, Pangeran Abdullah dan Pangeran Amir. Tamjidillah I kembali menjadi wali mereka. Pemerintahan yang singkat dari Muhammad Aminullah ditandai dengan sikap berseteru terhadap Kompeni, di mana menurut Aminullah, VOC berpihak kepada Tamjidillah I dan puteranya, Nata (Helius 2001).

Ketika mulai beranjak dewasa, Pangeran Amir melarikan diri dari istana Banjar. Sejak tahun 1785 kurang lebih dua tahun ia dan pengikutnya memerangi Sultan Nata untuk menuntut hak atas tahta. Namun ia dikalahkan oleh Nata yang dibantu VOC. Sejak tahun 1788 Amir berhasil lagi mengobarkan perlawanan dari Tanah Dusun namun setelah Belanda sekali lagi mengalahkannya, Amir akhirnya dibuang ke Sailan (Srilangka sekarang) pada tahun 1789. Meski demikian, ia berhasil menitipkan puteranya, Pangeran Mas'ud, di istana. Hal ini tidak menimbulkan keberatan dari pihak Nata, mungkin karena istri Amir adalah puteri Nata sendiri. Jadi, pangeran yang dititipkan itu adalah cucunya juga. Mas'ud kemudian dikawinkan dengan cucu Nata yang lain, Gusti Khadijah. Perempuan inilah yang melahirkan Pangeran Antasari, tokoh paling terkenal dalam sejarah Banjar karena peranannya yang sentral dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda (Saleh 1962; Helius 2001).

Dalam hiruk pikuk politik Istana Banjar sebagaimana terurai di atas, Dinasti Kuning adalah pihak yang paling dirugikan oleh politik kolonial Belanda. Meskipun secara tradisi merekalah pewaris sah tahta kesultanan. Tidak heran apabila dinasti ini yang paling gigih dalam melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial tersebut. Jadi, sekiranya alasan sentimen penjajahan Belanda dijadikan dasar keabsahan untuk merestorasi Kesultanan Banjar, maka keturunan Dinasti Kuninglah sesungguhnya yang paling berhak menggunakan legitimasi itu.

Sultan Muhammad Seman, misalnya. Penguasa terlama *pegustian* ini baru bisa dihentikan

perlawanannya terhadap Belanda setelah nyawanya direnggut peluru *Marsose*, pasukan elit Belanda pada tahun 1905. Di dalam buku Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung*, perlawanan itu bahkan masih diteruskan hingga tahun 1906 oleh anak-anak dan para pengikutnya. Kegigihan Sultan Muhammad Seman ini membuat J.M. Castelein cenderung menolak pendapat yang Belanda sentris, bahwa tahun 1860 sebagai akhir riwayat Kesultanan Banjar. Ia lebih suka menyebut tahun itu sebagai bermulanya masa senja kala dan kehancuran kesultanan tersebut seperti yang ditulis dalam kutipan berikut ini:

“...dan hendaknya dipikirkan djuga, bahwa sampai tahun 1905, sultan (biarpun sudah tidak berkedudukan di Banjarmasin, melainkan di Beras Kuning di pinggir Sungai Menawing) terus sanggup membuat orang-orang menghormati benderanja (bendera kuning dengan bulan sabit), sampai-sampai ke hilir sungai. Bila pada tahun 1713 sultan hanya dapat menembak dengan 5 atau 6 putjuk meriam, sekarang kesultanan telah dapat mempergunakan 21 putjuk meriam...”(Saleh 1962, 14).

4. Belanda Sebagai Pelegitimasi Politik

Berbeda dengan penulis lain yang kerap menyebut kelompok perebut kekuasaan Kesultanan Banjar adalah Dinasti Nata, saya lebih suka menyebutnya Dinasti Tamjid. Argumen saya didasarkan pada fakta, bahwa proses *usurpation* atau perebutan kekuasaan itu telah berlangsung sejak Sultan Tamjidillah I, meski kemudian yang intensif menjalin kerja sama dengan Belanda untuk menyingkirkan Dinasti Kuning dari tahta adalah Sultan Nata, anak beliau. Berbeda dengan almarhum kakaknya Sultan Kuning yang keturunannya hanya sebagian berhasil naik tahta, anak cucu Tamjidillah I berhasil jadi raja-raja sebelum kesultanan ini akhirnya dibubarkan Belanda pada 1860. Sultan Tamjidillah I beranak Sultan Nata beranak Sultan Sulaiman beranak Sultan Adam beranak Sultan Muda Abdurahman beranak Sultan Tamjidillah II.

Dengan merangkum dan menyingkat bahan-bahan relevan dari literatur-literatur rujukan tulisan ini, berikut uraian singkat tentang proses tersebut.

Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning wafat pada tahun 1734, meninggalkan Putera Mahkota Pangeran Aminullah yang belum dewasa. Sesuai

tradisi, saudara muda sultan bernama Tamjidillah yang jadi walinya dan berkuasa sementara sebagai sultan. Tetapi ketika putera mahkota sampai umurnya Sultan Tamjidillah I tidak menyerahkan tahta kepadanya. Pangeran Aminullah berhasil melarikan diri, setelah lolos dari beberapa kali upaya meracuninya di istana. Seperti telah disebut di muka, pada tahun 1759 Aminullah berhasil merebut tahta dari pamannya. Untuk sementara tahta di tangan dinasti yang sah. Namun setelah Sultan Aminullah meninggal pada tahun 1761 Dinasti Tamjid kembali mengambilnya, karena dua orang putera Aminullah (Pangeran Abdullah dan Pangeran Amir) sama seperti ayahnya dulu, masih di bawah umur. Di pihak Dinasti Tamjid, Pangeran Nata dinobatkan sebagai Sultan Akamuddin Saidullah. Pada tahun 1776 Pangeran Abdullah yang telah dewasa tewas diracun dan dicekik dalam sebuah undangan pertemuan di Istana Martapura. Pangeran Amir, saudara Abdullah, pada tahun 1782 melarikan diri dari istana. Pada tahun 1787 dengan dibantu oleh pamannya, seorang putera Raja Bugis dari Pasir, Amir menyerang Istana Martapura untuk merebut tahtanya sebelum akhirnya ia dikalahkan Sultan Nata yang dibantu VOC. Sebagai buah dari kerjasama kedua belah pihak, ditandatangani sebuah perjanjian pada tahun itu.

Meskipun *Kontrak 1787* mengorbankan kedaulatan Kesultanan Banjar untuk jatuh pada pertuanan Belanda, seperti yang dinyatakan pihak sultan: “... dengan suka sekehendak kami sendiri bukan dari sebab dipaksa akan itu menanggalkan tacht keradjaan negeri Banjar lalu menjerahkan itu kepada Kompeni Wilanduwi supaja... memberoleh selamat sentausa...” (ANRI 1965, 87), namun bagian terpenting dari kontrak itu menurut pandangan Nata ialah jaminan hak-hak hukum bagi keturunannya sebagai pengganti-pengganti yang sah atas tahta Kesultanan Banjar. Setiap usaha baru di pihak Amir atau keturunannya untuk memperoleh kembali kekuasaan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, dominasi atas kerajaan itu oleh dinastinya terjamin sepenuhnya di bawah perlindungan Belanda (Helius 2001), seperti dalam kutipan berikut ini:

“....djadi Sultan jang patut dari Bandjarmasin dengan lagi dia punya anak Sultan Soleman dengan tjutjunja Sultan Adam djadi gantinja kapan

meninggal.... orang yang tinggal di bawah perintahannya tiada boleh tidak ikut perintahnya sebab Tuan Keburnu Djenderal dengan segala Tuan Rad pan India kasih perintah ini dengan angkat Sultan dengan anak tjujunja beta djadi kebaikan tanah Bandjarmasin dengan orangnja segala-segala” (ANRI 1965, 87).

Memang, seperti yang diungkapkan banyak penulis sejarah Banjar, pola hubungan Kesultanan Banjar dengan bangsa-bangsa asing tidak bisa sekedar dilihat dari apa yang tampak di atas kertas saja. Sebab, acap kali kontrak-kontrak itu berakhir sebagai kertas kosong belaka ketika penguasa pribumi punya penafsiran berbeda dengan pihak asing terhadap isi kontrak.

Pada ulasan skripsi karya M. Idwar Saleh, J.M. Castelein (1962) mengapresiasi upaya Saleh yang berkali-kali mengemukakan soal-soal dalam negeri Banjarmasin sebagai sebab-sebab berbagai gejala (termasuk sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kesultanan: NP). Kehadiran VOC dilihatnya lebih pada proporsi yang sebenarnya, yakni sebagai pihak yang turut bermain dalam percaturan politik, bukan sebagai pihak yang terus-menerus menjadi lawan saja. Dalam hal ini pihak Banjar sendiri generasi demi generasi, mereka itu dikatakan Castelein mempunyai pandangan yang riil dalam segala persoalan. Mereka bekerjasama dengan orang Belanda, bila kerjasama itu menguntungkan mereka, dan lebih-lebih bila mereka memerlukan bantuan orang asing itu untuk melawan musuh-musuh mereka yang sebenarnya. Pendek kata, orang-orang asing itu dipergunakan mereka, kadang-kadang dengan cara yang licin sekali, untuk memperkokoh kedudukan sendiri. Jika orang Belanda itu mulai menyusahkan, maka tamatlah riwayat mereka itu (Saleh 1962, 5).

Pola hubungan seperti inilah yang rupanya dikembangkan Sultan Nata dengan *Kontrak 1787* itu. Dengan tanpa perlu mengulang hal-hal yang telah diungkap penulis-penulis terdahulu tentang masalah ini maka dapat disimpulkan kontrak itu berakhir sebagai sebuah kegagalan bagi VOC, dan kemenangan di pihak Nata. Dinastinya kokoh berkuasa sedangkan Banjarmasin hanya pos pengeluaran belaka bagi Belanda.

Namun politik semacam itu hanya mungkin terjadi selama Belanda menganggap Banjarmasin sebagai target yang kurang penting, sehingga mereka terkesan tidak pernah *all out* menaklukkan

negeri ini kendati telah berkali-kali ditipu melalui kontrak demi kontrak yang dibuat kedua belah pihak. Barometer politik terhadap kesultanan segera berubah ketika pada tahun 1840-an di daerah-daerah *lungguh* kesultanan di Pengaron dan Banyu Irang ditemukan lapisan-lapisan batubara yang sangat diperlukan kapal-kapal dagang dan kapal perang Belanda. Kesultanan Banjar tiba-tiba menjadi amat berarti bagi Batavia. Untuk mendapatkan konsesi penambangan di daerah itu Gubernur Jenderal Rochussen menginstruksikan Gubernur Borneo Weddik agar menempuh jalan apapun hingga pihak kesultanan terpaksa memberikannya.

Pada tanggal 28 September 1849, Gubernur Jenderal sendiri yang datang langsung ke Pengaron meresmikan pembukaan tambang itu dengan nama Tambang Batu Arang Oranje Nassau. Dalam perjalanan khusus ini Rochussen menyerahkan surat perintah khusus bersifat sangat rahasia kepada Residen Banjarmasin, berisi: “Selama kesultanan menepati janji-janji yang terdapat dalam kontrak dan tidak menghalangi kemajuan pertambangan batu arang tersebut, Belanda akan menjalankan politik bersahabat dan melindunginya.”

Kontrak yang dimaksud adalah *Kontrak 1826* yang dibuat pada masa Sultan Adam sebagai pembaharuan kontrak-kontrak sebelumnya, kali ini dengan Pemerintah Hindia Belanda karena VOC telah bubar pada tahun 1799. Kontrak baru ini antara lain berisi kesepakatan bahwa Belanda akan melindungi sultan dari musuh-musuh di dalam dan di luar negeri. Menurut Saleh, kontrak ini memang membawa soal untung rugi bagi kesultanan, misalnya untuk menjaga serangan dari luar, kesultanan kerap kali kewalahan. Dengan memfungsikan Belanda sebagai alat jaga yang permanen, keselamatan kesultanan untuk sementara terjamin (Saleh 1979, 11-12; 116).

Mungkin karena energinya terkuras oleh perebutan kekuasaan yang terus-menerus terjadi, Kesultanan Banjar sejak pertengahan abad ke-18 tak sempat lagi secara serius menangani masalah pertahanan hingga harus bergantung pada kekuatan asing untuk keperluan itu. Jauh sekali jika dibandingkan pada masa Panembahan Marhum (1595-1650) yang menurut L.C.D. van Dijk, kesultanan ini memiliki kekuatan 50.000 orang

prajurit (Saleh 1975, 31). Sebenarnya ini ucapan H. Brouwer yang menurut Helius (2001) adalah seorang komandan Belanda yang dikutip Saleh dari karya van Dijk. Ucapan itu berbunyi: “... *de koning aldaer gehouden wordt voor een zeer magtig heer, hebbende hem wel 50.000 man.....*”. Dalam M. Idwar Saleh (1962) menerjemahkannya: “...radja (Bandjarmasin) di sana dianggap orang amat berkuasa, dibawah perintahnja terdapat 50.000 orang peradjurit...” sedangkan Helius Sjamsuddin menerjemahkannya: “...rajanya sangat berkuasa dengan rakyat yang berjumlah 50.000 orang.”

Apapun halnya, dengan kondisi demikian Kesultanan Banjar pada abad ke-17 mampu membendung pengaruh Tuban, Arosbaya (Surabaya?), dan Mataram, di samping berhasil menancapkan pengaruhnya atas Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat beserta penghasilan upeti tahunannya (Saleh 1975, 31). Sesuatu yang telah absen dalam politik Banjarmasin abad ke-19.

Di samping aspek militer di atas, pasal 11 dan 12 *Kontrak 1826* menyebutkan, bahwa Belanda berhak mengangkat anggota keluarga kerajaan yang disukai untuk menjadi putera mahkota dan mangkubumi: “Kapan datang suatu masa hukum Allah Sri Paduka Sultan meninggalkan melainkan siapa jang sudah kesukaan geburmin djadi pangiran ratu (putera mahkota: NP) lantas berdiri djadi mengganti dia punja kedudukan Sultan itu.... Sri Paduka Sultan tiada boleh sekali mendirikan Pangiran Mangkubumi melainkan lebih dahulu mengasih tahu jang dia punja kesukaan itu kepada tuan residen....” (ANRI 1965, 237).

Hak Belanda untuk mengonsultasikan dan mengangkat mangkubumi dan putera mahkota Kesultanan Banjar sesuai isi kontrak, dengan sendirinya menempatkan bangsa Eropa itu sebagai sumber legitimasi politik baru bagi elit kesultanan ini. Sebab itulah ketika terjadi kekisruhan tentang siapa yang menggantikan Sultan Muda (Putera Mahkota) Abdurrahman yang meninggal pada tahun 1852, calon Residen van Hengst-lah yang terpilih, yaitu Pangeran Tamjidillah II. Bukan Pangeran Hidayatullah yang diusulkan Sultan Adam. Alasan tradisi yang dikemukakan Sultan Adam bahwa pangeran yang akan diangkat sebagai pewaris mahkota menurut adat harus lahir dari seorang Ratu ditolak residen dengan mengatakan bahwa empat sultan terakhir, termasuk Sultan Adam

sendiri, seperti Tamjidillah II, adalah anak-anak dari Nyai atau perempuan biasa, bukan anak Ratu (Helius, 2001).

Dalam konteks ini barangkali kita dapat lebih arif dalam memahami kenapa surat wasiat Sultan Adam yang dihormati itu, tentang penunjukkan Pangeran Hidayat selaku penggantinya, terkesan “membentur realitas”. Selain karena sebelumnya tidak terlalu konsisten dalam menjadikan tradisi sebagai rujukan utama dalam suksesi istana, negara tradisional ini juga telah kehilangan “perangkat-perangkat kekuasaan” yang dapat memaksakan terealisasinya wasiat tersebut. Kemampuan semacam itu telah lama dilucuti Belanda melalui kontrak demi kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak.

Terlepas dari namanya yang sering jadi “tokoh antagonis” dalam sejarah Banjar, Sultan Tamjid II sepertinya termasuk seorang politikus yang realistis dalam membaca situasi pada masa itu. Ia sepertinya memahami bahwa faktor tradisi tak lagi menjadi penentu utama bagi seorang pangeran untuk dapat tampil sebagai penahnta Kesultanan Banjar. Selain itu ia paham betul kepentingan Belanda akan keberadaan Tambang Batubara “*Oranje Nassau*” milik mereka yang terletak di tanah Sultan. Untuk itu pada tahun 1852, sehari setelah ayahnya (Sultan Muda Abdurrahman) meninggal ia mengirim surat rahasia kepada residen yang isinya antara lain: “...yang saya nanti serahkan kepada Gubernemen Hindia Nederland segala penggalian batu arang yang ada di dalam watas karajaan Bandjermasin adanja” (Helius 2001).

Dengan dilegitimasi Belanda maka melengganglah saudara tiri Hidayatullah ini ke tahta kesultanan. Namun karena sultan ini menurut Prof. Dr. Taufik Abdullah adalah sumber konflik, maka Kesultanan Banjar pun dihapus Belanda dan hanya riil dalam kenangan saja. Sultan Tamjid II dipecat Belanda pada 24 Juni 1859, lalu dibuang dengan seorang istri, 22 orang selir, dan 9 orang anggota rumah tangga lainnya. Di Bogor, Raja Banjar terakhir versi Belanda ini hidup dengan uang pensiun bulanan sebesar fl. 2600. Sementara Pangeran Hidayatullah, saingannya, yang sempat dinobatkan oleh rakyat sebagai Sultan Hidayatullah Halilullah sesuai wasiat kakeknya, dan turut memimpin rakyat selama dua tahun dalam Perang Banjar akhirnya

menyerah. Pangeran ini dibuang Belanda pada tahun 1862 ke Cianjur, Jawa Barat. Di sini ia bersama keluarganya hidup dengan uang pensiun sebulan fl. 1000 sampai ia meninggal tahun 1904 (Helius 2001).

Namun ini bukan akhir sebenarnya dari Kesultanan Banjar. Nun jauh di sana, di Dusun Hulu (di pedalaman Kalimantan Tengah sekarang), anggota-anggota Dinasti Kuning di bawah ancaman dan berondongan peluru Belanda mampu mempertahankan tradisi kesultanan hingga awal abad ke-20.

5. Tahta Sebagai Pemersatu

Terlihat pada uraian di atas, penyingkiran Dinasti Kuning yang sah dari tahta Kesultanan Banjar, mengakibatkan eksistensi Dinasti Tamjid pada keraton menjadi kokoh, namun sekaligus menjadi sangat tergantung dengan kekuatan asing pendukungnya. Meski secara tradisi masalah *ketutusan* tetap sebagai unsur penting dalam suksesi istana, namun secara riil ia tak lagi menjadi penentu utama. Sekiranya ucapan Residen van Hengst benar adanya, bahwa empat sultan pada dinasti ini lahir dari perempuan biasa, maka ini artinya tradisi lama dalam suksesi Istana Banjar tak begitu dirujuk oleh Dinasti Tamjid. Ini tidak aneh, karena legitimasi politik mereka terutama memang bersumber dari Pemerintah Kolonial Belanda (lihat kembali *Kontrak 1787* dan *Kontrak 1826*).

Anggota dinasti ini bahkan ada yang tak segan-segan menyerahkan sebagian tanah leluhur kepada Belanda demi mendapatkan dukungan dalam persaingan memperebutkan tahta. Kasus Sultan Tamjid II memperlihatkan hal itu. Untuk kepentingan yang sama, kalau perlu tahta kerajaan pun oleh Sultan Nata diserahkan kepada *Kompeni Wilanduwi* meski dikembalikan lagi untuk diperintah sultan dan keturunannya sebagai “negeri pinjaman”, seperti yang tergambar dalam kutipan berikut ini: “...seperti arti barang yang diberi pinjam yang baka tiada boleh mati agar supaja aku dan aku ampunja dzuriat-dzuriat yang muta'chirin.... duduk memerintah dan menjelenggarakan keradjaan...” (ANRI 1965, 85). Ini membuktikan betapa tak berdaulatnya kesultanan ketika berada di dalam sistem pertuanan Belanda.

Kesultanan Banjar tidak sendirian dalam hal ini. Menurut Sartono Kartodirdjo, dalam pembentukan *Pax Neerlandica* lewat proses pasifikasi selama

abad XIX banyak kerajaan atau negara pribumi masuk di bawah kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda. Dasar hukum dari hubungan kedua belah pihak itu ditentukan dalam perjanjian, terkenal sebagai Pernyataan Panjang (*Lange Verklaring*) dan Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*). Ada 15 negara yang menandatangani yang pertama sedang 254 yang kedua (Kartodirdjo 2001, 347).

Ketika pemerintah kolonial runtuh kekuasaannya di Nusantara negara-negara tradisional itu pun kehilangan sumber legitimasinya. Ini dengan sendirinya mendorong mereka untuk mencari sumber legitimasi baru di samping sumber-sumber tradisional. Dalam konteks inilah dapat dipahami langkah strategis Sultan Hamengkubuwono IX yang mengintegrasikan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Situasi berbeda di alami Kesultanan Banjar. Pada saat penguasa kolonial runtuh, kesultanan ini telah lenyap dari sejarah. Karenanya tidak tercipta kondisi sebagaimana yang dialami Kesultanan Yogya untuk mengambil langkah-langkah demi lestarnya tradisi kesultanan.

Baru pada 12 Desember 2010 Keraton Banjar resmi didirikan lagi dengan menobatkan Pangeran Haji Khairul Saleh sebagai Raja Muda (Mulyadi 2011, 21). Sebagai salah seorang *tutus* kesultanan, tokoh ini sejak tahun 2004 memang telah secara rutin menghadiri undangan Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) dalam berbagai acara budaya dan kekerabatan yang diselenggarakan secara bergiliran di berbagai daerah. Pemerintah sendiri mendukung terhadap lembaga FSKN melalui Permendagri No 39 Tahun 2007 tentang pedoman fasilitas organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan keraton dan lembaga adat dalam pelestarian pengembangan budaya daerah.

Jadi, peraturan itulah dasar hukum sekaligus sebagai sumber legitimasi budaya bagi keberadaan Kesultanan Banjar versi baru. Tiga tahun sebelum dinobatkan, Gusti Khairul Saleh sendiri melalui harian Banjarmasin Post menyatakan: “Ini semata-mata sebagai perwujudan dari niat tulus ingin menyelamatkan budaya bangsa” (Banjarmasin Post 8 April 2006). Sebenarnya ini tidak aneh karena menurut Helius Sjamsuddin,

dahulu pun keraton menjadi pusat, pelindung, dan penggerak utama budaya.

Dalam konteks pelestarian budaya, keberadaan keraton pada era postmodern dan global saat ini memang dapat difungsikan secara defensif, yaitu sebagai benteng dan filter terhadap derasnya arus masuk budaya asing. Pada saat yang sama ia dapat pula menjalankan fungsi aktifnya, yaitu sebagai penggali nilai-nilai budaya asli yang telah banyak ditinggalkan masyarakat Banjar sendiri. Namun demikian, visi dan misi budaya yang diemban keraton mestinya tidak berhenti sebatas pengembalian hal-hal yang bernilai dari masa lalu, melainkan diletakkan secara progresif dan dinamis hingga sejalan dengan laju zaman. Di titik inilah keraton dapat memainkan peran penting ketika budaya tidak sekadar dipahami sebagai hal statis dalam selubung sakralitas tradisi. Budaya, sesuai karakternya yang dinamis, mesti dipahami sebagai sesuatu yang selalu berkembang dan dikembangkan dalam seluruh aspeknya³.

Jika ada penyoalan terhadap *ketutusan* sang penahnta, ini sebenarnya kurang relevan lagi dalam situasi kekinian. Untuk ini ada baiknya kita tengok ke belakang tentang fakta-fakta yang terkait kesultanan. Tahta Dinasti Kuning yang dilegitimasi tradisi telah diberangus secara berdarah oleh Belanda sejak tahun 1905. Sementara tahta Dinasti Tamjid yang dilegitimasi Belanda juga ditindas secara politik melalui penghapusannya pada tahun 1860. Jadi, tak begitu perlu lagi mempersoalkan siapa di antara keturunan Raja Banjar yang paling berhak menduduki tahta budaya ini, apalagi sampai bersilang-sengketa seperti masa silam. Terlebih tahta itu saat ini tak mungkin lagi bermakna kekuasaan dalam arti riil, mengingat fungsi itu telah dijalankan oleh pranata negara bernama Indonesia.

Penahnta di ranah kultural ini lebih ditentukan oleh seberapa besar kemauan dan kemampuan di antara para *tutus* raja untuk meraihnya. Kedua kriteria itu kebetulan dimiliki oleh seorang Khairul Saleh. Jika pun terbetik ada keinginan dari seseorang "*nang handak jua jadi raja*", punyakah ia kemampuan dan sumber daya sebagaimana yang dipunya Khairul Saleh untuk merealisasikannya?

Mungkin sebagai bagian dari misinya menyatukan para *zuriat* kesultanan, pada Kamis 15 September 2011 Raja Muda H. Khairul Saleh berziarah ke makam Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari di Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Fenomena ini bermakna simbolik secara historis, mengingat Khairul Saleh adalah keturunan Pangeran Singasari bin Sultan Sulaiman (Mulyadi 2011, 22) yang berarti ia berasal dari Dinasti Tamjid. Sementara penghuni makam yang diziarahnya adalah Raja Banjar terakhir dari Dinasti Kuning. Ini dapat dibaca sebagai sebuah upaya rekonsiliasi konflik di antara kedua dinasti yang dulu terjadi. Semoga saja Kesultanan Banjar dalam situasi kekinian benar-benar mampu menjadikan tahta sebagai alat pemersatu, bukan sumber konflik seperti pada masa lalu.

6. Kekhawatiran Itu

Restorasi Keraton Banjar sebetulnya cukup mengundang polemik di tengah publik Banua. Media cetak dan jejaring sosial menjadi media perdebatan opini tentang hal ini. Sebagian kalangan memandang fenomena kekeratonan sebagai bangkitnya feodalisme yang kontraproduktif terhadap gerak maju masyarakat Banjar di alam modern ini. Sekalipun diklaim sebagai pengemban misi budaya, namun keterikatan sebagian masyarakat yang mulai, sedang, dan telah terbangun terhadap keraton bisa saja tiba-tiba dibelokkan sebagai "amunisi" bagi sang penahnta untuk terjun ke panggung politik praktis. Maju sebagai calon gubernur misalnya. Lalu apa salahnya? Khairul Saleh adalah sosok pemimpin muda yang potensial dan memiliki pengalaman (saat ini menjabat Bupati Banjar untuk periode kedua). Sejauh memenuhi kriteria yang ditetapkan perundang-undangan, sebagai warga negara ia tentu memiliki hak yang sama sebagaimana kandidat lain untuk dipilih dan memilih.

Namun demikian, percayalah keterpilihan seseorang pada jabatan publik dalam sistem demokrasi tidak ditentukan oleh faktor keturunan, atau posisi sebagai raja. Ini lebih pada soal kemampuan para kandidat mendekati massa

³ Pokok pikiran alenia ini hasil diskusi penulis dengan bapak Drs. Bambang Subiyakto, M.Hum di rumah beliau Banjarbaru pada Selasa, 31 Januari 2012 ketika memperbincangkan Keraton Banjar di bawah Raja Muda Pangeran Haji Khairul Saleh.

pemilih, sampai sejauh mana program yang ia tawarkan sejalan dengan kebutuhan dan ekspektasi publik. Sebuah kapasitas yang dapat dimiliki oleh siapa saja, meski tak berdarah bangsawan. Dengan kedewasaan politik masyarakat di tingkat sekarang, tetap saja pencitraan dan tawaran-tawaran janji kampanye yang lebih memukau mereka. Ini pun masih tergolong ideal. Ditambah dengan keberdayaan ekonomi masyarakat di level sekarang, terkadang faktor penentu bisa jadi justru tawaran-tawaran bersifat pragmatis dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah “serangan fajar”.

Apa boleh buat, demikianlah potret wajah demokrasi kita. Absurd tentunya jika membandingkannya dengan demokrasi Amerika yang telah berusia ratusan tahun. Namun satu hal dapat dipastikan, semua kandidat untuk jabatan-jabatan publik akan setara kedudukannya di dalam sistem politik yang kita anut. Takkan ada pengistimewaan sebagaimana di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena demokrasi adalah ajang kontestasi para egaliter, bukan milik kaum aristokrat.

D. Penutup

Dari uraian di atas tibalah kita pada beberapa kesimpulan. Kesultanan Banjar adalah sebuah Kerajaan Islam yang legitimasi politiknya berakar dari tradisi sinkretik antara Hindu dengan kepercayaan asli masyarakat pribumi Kalimantan, di samping nilai-nilai Islam yang datang kemudian.

Dalam tradisi politik ini *ketutusan* (kemurnian, garis lurus turunan raja) dilembagakan dalam proses suksesi istana, namun karena konflik berkepanjangan ia kerap kali menjadi tak begitu

dipentingkan oleh sebagian elit istana. Retaknya tradisi politik ini diperparah oleh hadirnya kekuatan asing yang berusaha memancing di air keruh demi kepentingan kolonialismenya. Ini membawa implikasi serius ke dalam sistem politik Kesultanan Banjar hingga menggiringnya ke jurang kehancuran.

Kehadiran bangsa asing dalam percaturan politik lokal ternyata tidak selalu dapat dipandang secara hitam putih, yaitu sebagai penyebab utama runtuhnya Kesultanan Banjar. Acap kali mereka justru diundang lalu diajak bersekutu oleh salah satu kubu dalam faksionalisme istana. Seiring dengan meningkatnya kepentingan ekonomi dan politik mereka terhadap tanah-tanah sultan, pihak asing (Belanda) itu berusaha pula meningkatkan posisinya dalam berhubungan dengan elit-elit pribumi. Setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya, mereka tidak lagi hanya tampil sebagai salah satu pihak yang bermain dalam intrik politik Kesultanan Banjar, melainkan sanggup menempatkan diri sebagai “tuan” yang mengendalikan permainan. Sebuah posisi yang memberi mereka legitimasi untuk menentukan mati hidup kesultanan.

Upaya untuk membangkitkan kembali Kesultanan Banjar setelah lebih seabad keruntuhannya cukup mengundang prokontra di tengah publik Kalimantan Selatan. Klaim pelestarian budaya sebagai alasan utama dibalik restorasi tersebut tidak sepenuhnya dapat meyakinkan mereka yang terlanjur mencurigai adanya agenda politik tertentu. Hanya sejarah kelak yang dapat memperlihatkan motif sebenarnya, daya tahan, dan konsistensi Kesultanan Banjar versi baru ini.

Referensi

Abar, Husni. 2002. *Panembahan Muda Aling Datu Muning: studi kasus tentang kekuasaan masyarakat Banjar*. Tapin: Pemda Tapin.
Adam, Asvi Warman. 2007. *Ketika rezim politik berganti di dalam pelurusan sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Alamsyah, Randu. 2001. *Jalan sunyi kebudayaan (biografi Sultan Banjar Pangeran H. Khairul Saleh)*. Banjarbaru: Mingguraya Press.
Anonim. 1965. *Surat-surat perdjanjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintah VOC, Bataafse Republik,*

- Inggeris dan Hindia Belanda 1635-1860*. Jakarta: Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat.
- Anonim. 2006. *Keraton Banjar bakal berdiri lagi*. Banjarmasin Post. 8 April.
- Basrowi dan Sudikin. 2003. *Teori-teori perlawanan dan kekerasan kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Helius, Sjamsuddin. 2001. *Pegustian dan temenggung: akar sosial, politik, etnis, dan dinasti, perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirjo, Sartono. 2001. *Pengantar sejarah Indonesia baru 1500-1900: dari emporium ke imperium*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahin, Marko. 2005. *Menunggu naga Di Sungai Martapura*. Banjarmasin Post. 24 September.
- Mulyadi, Bambang Dedi. 2011. *Selayang pandang Kesultanan Banjar dan pembentukan lembaga adat dan kekerabatan Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan*. Cetak Kedua. (tanpa info penerbit).
- Roeslan, Tamny. *Gerakan Muning: sebuah gerakan sosial dalam Perang Banjar*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Said, Muhammad. 2011. *Raja diraja Kerajaan Banjar*. Martapura: Pustaka Agung Kesultanan Banjar.
- Saleh, M. Idwar. 1962. *Bandjarmasin: selajang pandang mengenai bangkitnja keradjaan Bandjarmasin, posisi, fungsi dan artinja dalam sedjarah Indonesia dalam abad ketudjuhbelas*. Bandung: Balai Pendidikan Guru.
- _____. 1975. *Banjarmasih, sejarah singkat mengenai bangkit dan berkembangnya Kota Banjarmasin serta wilayah sekitarnya sampai dengan tahun 1950*. Banjarmasin.
- _____. 1979. *Studi mengenai paranan Pangeran Antasari dalam Perang Banjar Tahun 1859 – 1865 (orientasi sejarah lokal)*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Keguruan.
- _____. 1984. *Sekilas mengenal daerah Banjar dan kebudayaan sungainya sampai dengan akhir abad 19*. Banjarmasin: Depdikbud Dirjend Kebudayaan Kalimantan Selatan Banjarmasin.
- Tim Peneliti. 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Pemprov Kalimantan Selatan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)